



Pemerintah Kota
Padang Panjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

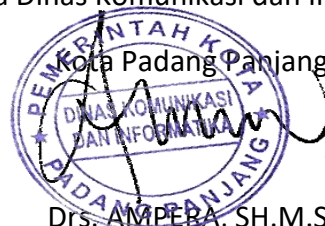
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Dalam laporan ini dipaparkan lebih lanjut capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Penyusunan LKjIP 2022 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan penyusunan Laporan Kinerja yang terukur dan memaparkan hasil capaian yang tergambar jelas dari tiap indikator kinerja, dapat menjadi salah satu upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

Demikian laporan ini disusun, agar dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan sekaligus umpan balik dalam melakukan penyusunan program di tahun selanjutnya. Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan.

Padang Panjang, Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. AMPERA, SH.M.Si

NIP. 19680101 199803 1 010

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan :	1
C. Penjelasan Umum Organisasi	5
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi OPD	8
E. Sistematika Penyusunan LKJIP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan dan Sasaran	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2022	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2022 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam LKjIP ini dipaparkan evaluasi atas capaian dan tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2022, yang berguna sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

B. Maksud dan Tujuan :

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan:

1. Sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban, dan sekaligus sebagai media peningkatan kinerja.
2. Untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang periode tahun 2022

3. Agar sumber-sumber anggaran yang dialokasikan penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien pemakaiannya.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja dan pedoman dalam meningkatkan kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) ini bertujuan :

1. Sebagai indikator dalam melihat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Dapat menjadi acuan dalam menyusun Lakip Pemerintah Kota Padang Panjang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang.
3. Sebagai program strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.

C. Penjelasan Umum Organisasi

C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;

3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.

- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Pengelolaan E-Government, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi AStatistik.
- c. **Seksi Layanan Aplikasi**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Aplikasi.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

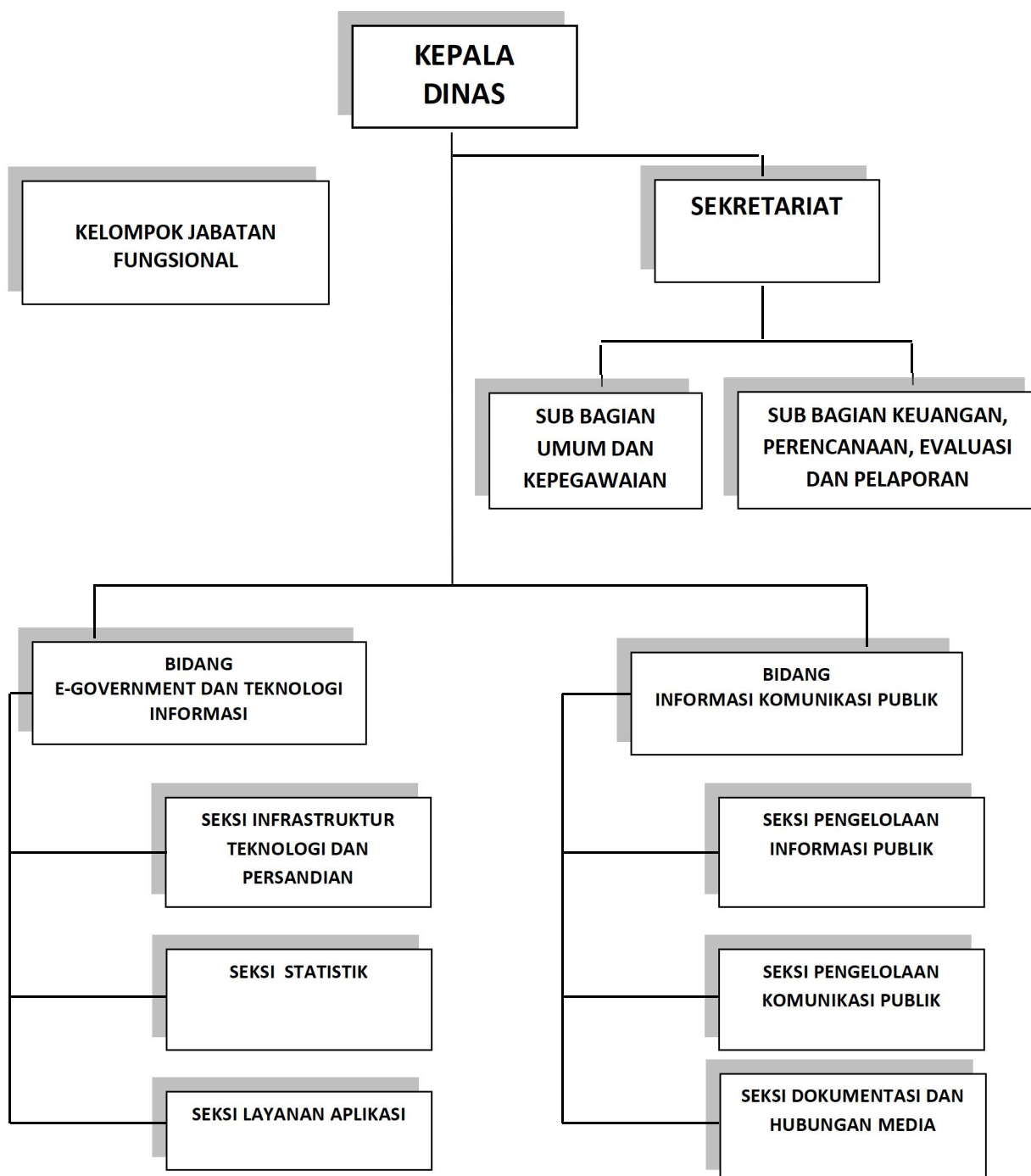
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Dokumentasi dan Hubungan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Berdasarkan kondisi tahun 2022, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 69 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 45 orang tenaga harian lepas (THL). Adapun gambaran statistik ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	3 orang	-	3 orang
2	Golongan III	8 orang	9 orang	17 orang
3	Golongan II	3 orang	1 orang	4 orang
4	Tenaga Harian Lepas	16 orang	29 orang	45 orang

2. Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III	3 orang	-	3 orang
2	Eselon IV.a	4 orang	4 orang	8 orang

3. Menurut jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	2 orang	-	2 orang
2	Strata I	8 orang	5 orang	13 orang

3	Diploma III	3 orang	3 orang	6 orang
4	SLTA	1 orang	2 orang	3 orang

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Penentuan Isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil analisa permasalahan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada dalam rangka percepatan transformasi digital.
2. Peningkatan kualitas konten layanan audio visual dan multimedia dalam rangka transparansi, diseminasi dan keterbukaan informasi publik.
3. Penyediaan data statistik sektoral yang mudah diakses oleh masyarakat guna percepatan Satu Data Indonesia.

E. Sistematika Penyusunan LKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Permasalahan utama yang dihadapi oleh OPD
- E. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Dinas, Kominfo Tahun 2022

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2022

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Visi dan Misi

Visi dan misi Walikota Padang Panjang periode 2019-2023, merupakan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD. Visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat ”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu :

1. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
3. Kesehatan : Padang Panjang Sehat dan Bahagia
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Kominfo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-3 RPJMD yakni **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif** yang selanjutnya diwujudkan melalui sasaran **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

Salah satu indikator dalam pencapaian sasaran RPJMD terkait kinerja pemerintahan ini adalah meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dalam hal ini dimaksudkan adalah terlaksananya berbagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur sehingga tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang cerdas (Smart City) melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana melalui pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan akan terwujud pembaharuan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Beranjak dari pencapaian misi ke 3 dan sasaran RPJMD dirumuskan Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

Tujuan II : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo

Tujuan, sasaran berikut indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk tahun 2022 tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TAHUN KE-
					2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		55.22
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks SPBE merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.	2.25
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (skala 1-100)	93%
		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	% jumlah data statistik yang terpublikasi/target	83%

2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan		Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Hasil survey IKM	1,39
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	Hasil survey IKM	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis

pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama untuk mendukung 4 (empat) sasaran strategis OPD. Pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

A.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi.

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 1, Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis	2,25	2,81	125%

	partisipatif berbasis teknologi informasi	Elektronik			
--	-------------------------------------------	------------	--	--	--

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target sebesar **2,25**. Penilaian indeks ini dilakukan melalui evaluasi oleh Kemenpan RB secara daring mempedomani Permenpan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan hasil penilaian oleh Kemenpan RB pada akhir tahun 2022, diperoleh nilai indeks SPBE Kota Padang Panjang pada tahun 2022 sebesar **2,81** dalam artian “**baik**”. Penilaian SPBE ini meliputi 4 domain, yakni kebijakan, tatakelola, manajemen, dan layanan.

Perolehan nilai untuk masing masing domain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1.2

No	Domain	Bobot	Nilai/Indeks
1	Kebijakan SPBE	13 %	2,90
2	Tata kelola SPBE	25 %	2,20
3	Manajemen SPBE	16,5 %	2,09
4	Layanan SPBE	45,5 %	3,37
	Indeks SPBE		2,81

Sumber: Hasil evaluasi SPBE oleh Kemenpan RB tahun 2022

Untuk domain kebijakan diperoleh nilai **sebesar 2,90**. Indeks ini diperoleh dari pengukuran terhadap 1 aspek dan 10 indikator yang berkaitan dengan ketersediaan dokumen pendukung dan legalitas pelaksanaan SPBE pada unit layanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Indeks penilaian dari 10 indikator tersebut rata rata 3 (dalam artian baik), terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya karena telah diselesaikannya beberapa regulasi dan dokumen terkait SPBE diantaranya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pengembangan Aplikasi, SK Tim Koordinasi SPBE dan penyusunan dokumen peta rencana SPBE.

Sementara itu, untuk domain tata kelola, diperoleh nilai indeks **sebesar 2,20**. Pengukuran indeks ini dilakukan terhadap 3 aspek dan 10 indikator yang berkaitan dengan standar operasional prosedur organisasi (SOP), arsitektur, dan pengelolaan tim koordinasi untuk berjalannya SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dari 10 indikator tersebut rata-rata bernilai 2 (dalam artian cukup). Untuk yang bernilai 3 (dalam artian baik) pada domain tata kelola ini terdapat pada indikator Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah, Peta Rencana SPBE Instansi pusat/pemerintah, Layanan Pusat Data dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi. Nilai indeks domain tata kelola ini masih bernilai cukup dikarenakan belum selesainya penyusunan dokumen seperti arsitektur SPBE serta inovasi dan proses bisnis SPBE.

Pada domain manajemen, diperoleh nilai **sebesar 2,09**. Pengukuran indeks ini dilakukan terhadap 2 aspek dan 11 indikator. Secara umum, nilai rata-rata dari masing-masing indikator 2 (dalam artian cukup). Hal ini dikarenakan domain manajemen merupakan domain baru dalam pengukuran SPBE sesuai dengan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 sehingga belum dilakukan evaluasi dan audit terhadap semua manajemen pelaksanaan SPBE, namun demikian sudah terjadi peningkatan pada beberapa indikator yaitu indikator penerapan Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Data mendapatkan nilai 3 (dalam artian baik).

Sedangkan untuk domain layanan, diperoleh nilai **sebesar 3,37**. Pengukuran ini menunjukkan pengelolaan berbagai layanan digital baik untuk administrasi publik ataupun layanan publik sudah termasuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari 8 layanan yang tergolong dalam kategori sangat baik yaitu perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, layanan kinerja pegawai, layanan data terbuka, layanan jaringan dokumentasi dan informasi serta layanan publik sektor 2, sementara untuk layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintahlainnya masih berada dalam kategori cukup.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, `transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

No	Indikat or Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks SPBE	na	na	-	1,86	2,67	143 %	2, 65	3,01	113%	2,7	2,09	77%	2,25	2,81	125 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dan nilai realisasi melebihi nilai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu tersedianya dokumen pendukung dan legalitas pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang serta terjadi penambahan dan pengembangan beberapa layanan digital administrasi dan layanan publik .

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dan target akhir Renstra

Sasaran Srategis 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Indeks SPBE	2,81	2,6	108 %

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator indeks SPBE pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan sebesar 108 %.

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap capaian indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pimpinan untuk menyusun dokumen pendukung terkait dengan domain kebijakan dalam indeks SPBE, dengan disahkannya beberapa

regulasi dalam rangka implementasi beragam layanan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

2. Partisipasi aktif dari seluruh unit layanan pengelola SPBE (OPD) dalam menyelenggarakan SPBE.
3. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan layanan berbasis elektronik.

Tabel 3.1.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Rata-rata Nasional
1.	Indeks SPBE	2.81	2.35

Berdasarkan laporan hasil pemantauan oleh Kemenpan RB untuk seluruh IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2022 diperoleh nilai rata-rata nasional indeks SPBE sebesar 2,35. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai capaian realisasi SPBE Kota Padang Panjang sudah melebihi standar atau rata-rata nasional.

Tabel 3.1.6

Tabel Realisasi Anggaran (per Indikator Kinerja)

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	TA 2022	
			Realisasi	% serapan dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.745.905.400	2.684.393.998	97,76%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.745.905.400	2.684.393.998	97,76%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	289.423.800	276.720.980	95,61%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	2.456.481.600	2.407.673.018	98,01%

	Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	24.955.000	24.200.600	96,98%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.955.000	24.200.600	96,98%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.955.000	24.200.600	96,98%

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung indikator kinerja terkait dengan indeks SPBE adalah baik dengan realisasi anggaran diatas 95% yang bersumber dari pelaksanaan 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

A.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 2, Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	93%	99,92	107%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan target sebesar 93% dalam artian “ **informatif**”. Berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat terhadap badan layanan publik (PPIB) Kota Padang Panjang pada Bulan November Tahun 2022, Kota Padang Panjang memperoleh nilai 99,92% atau predikat **informatif**.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Srategis 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
----	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	na	na	-	71 %	78 %	110 %	74 %	80 %	108 %	78 %	92,32 %	118 %	93 %	na	0%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan keterbukaan informasi publik ini meningkat setiap tahunnya melebihi target atau dalam artian sangat baik.

Tabel 3.2.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dan target akhir Renstra

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian
2.	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	99,92%	94%	107%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 ini sudah melebihi target Renstra yang ditetapkan sebesar 99,92% atau dengan capaian sebesar 107%.

Adapun faktor pendukung terhadap capaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Komitmen, konsistensi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi antara Pimpinan dan stakeholder terkait dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik terutama terkait pemenuhan Daftar Informasi Publik (DIP) oleh PPID pembantu (OPD).

Tabel 3.2.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d TW3 Tahun 2022 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional
1.	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	na	na

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase peningkatan keterbukaan informasi publik dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak ada penetapan standar skala nasional untuk indikator ini.

Tabel 3.2.5

Tabel Realisasi Anggaran (per Indikator Kinerja)

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Tahun 2022	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.705.371.800	2.661.495.151	98,38%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.705.371.800	2.661.495.151	98,38%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	224.957.400	220.803.232	98,15%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	411.799.600	379.530.146	92,16%
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	2.064.614.800	2.059.074.898	99,73%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4.000.000	2.086.875	52,17%

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung indikator kinerja terkait dengan persentase peningkatan keterbukaan informasi publik adalah

cukup baik dengan realisasi anggaran diatas 95% untuk 3 (tiga) sub kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi sebesar 52,17% dikarenakan terjadinya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran terjadi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dimana pelatihan Bakohumas yang dilaksanakan digabungkan dengan pelatihan statistik dikarenakan kesamaan peserta dan adanya korelasi antara 2 (dua) sub kegiatan ini, sehingga untuk pelaksanaannya menggunakan anggaran Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah.

A.3 Sasaran Strategis 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 3, Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis 3 Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	83%	83%	100%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi sebanyak 83 %. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir tahun 2022 untuk indikator ini sudah terealisasi sebesar 83 % atau dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui evaluasi terhadap persentase jumlah OPD yang telah mempublikasikan data statistik sektoralnya melalui

website data.padangpanjang.go.id. Dari 24 OPD yang ada, 20 (dua puluh) OPD sudah mempublikasikan data statistik sektoralnya.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 3 Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip

Satu Data Indonesia

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	na	na	-	25%	na	na	30%	33%	110%	32%	58%	181%	83%	83%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja indikator untuk 2 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan mulai adanya kesadaran masing masing OPD akan pentingnya ketersediaan data statistik sektoral terkait tupoksi dan sudah mulai terciptanya koordinasi yang baik antara Dinas Kominfo sebagai walidata dan OPD sebagai penyedia data.

Tabel 3.3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dan target akhir Renstra

Sasaran Strategis 3 Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip

Satu Data Indonesia

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	% Capaian
3.	Persentase Data Statistik Sektorial yang terpublikasi	83%	100%	83%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada tahun 2022 ini sudah mencapai 83% dari target capaian akhir Renstra.

Tabel 3.3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d TW3 Tahun 2022 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional
3.	Persentase Data Statistik Sektorial yang terpublikasi	83%	na

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Data Statistik Sektorial yang terpublikasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada penetapan standar skala nasional untuk indikator ini.

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap capaian indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengukuhan Walidata Pendukung oleh Walikota Padang Panjang sebagai bentuk pemberian tanggungjawab terhadap pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Kota Padang Panjang.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dan evaluasi rutin Forum Satu Data Kota Padang Panjang dan Walidata Pendukung sehingga meningkatkan partisipasi OPD dalam pengelolaan data.

A.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 4, Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	IKM	86	80,98	94%

Indikator pada sasaran ini adalah meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo dengan target nilai indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86. Penilaian indeks ini dilakukan melalui survey yang dilakukan oleh LPPM Unand. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap layanan website dan sarana dan prasarana teknologi informasi publik Dinas Kominfo Kota Padang Panjang selama tahun 2022.

Hasil perhitungan SKM dalam kuesioner survey terhadap Layanan Website, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Nilai SKM dan Kinerja 5 Unsur Pelayanan pada Layanan Website

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai SKM Per Unsur	Kinerja Pelayanan
1	Ketersediaan fasilitas informasi yang disediakan di laman web Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsur ke-1)	184	3.680	92.00	Sangat Baik
2	Kualitas laman website yang disediakan Pemerintah Kota Padang	132	2.640	66.00	Kurang Baik

	Panjang(Unsurke- 2)				
3	Pemanfaatan laman website Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang(Unsurke-3)	178	3.560	89.00	Sangat Baik
4	Kesesuaian isi/informasi yang disajikan dilaman website Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsur ke-4)	184	3.680	92.00	Sangat Baik
5	Kelengkapan informasi publik yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-5)	175	3.500	87.50	Baik
	TOTAL	853	17.060		

Tabel 3.4.3

Tabel Perhitungan Nilai SKM Layanan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan fasilitas informasi yang disediakan dilamanweb Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsurke-1)	184	3.680	0.736
2	Kualitas laman website yang disediakan Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsur ke-2)	132	2.640	0.528
3	Pemanfaatanlamanwebsite PemerintahDaerahKotaPadang Panjang (Unsur ke-3)	178	3.560	0.712
4	Kesesuaian isi/informasi yang disajikan di laman website Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsur ke-4)	184	3.680	0.736
5	Kelengkapan informasi publik yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-5)	175	3.500	0.700
	Total	853	17.060	3.412
	Total Nilai Konversi (NIK)		3.412	
	Total Nilai Konversi (NIK) x 25		85.30	
	Mutu Pelayanan		B	

Kinerja Pelayanan	Baik
-------------------	------

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang setelah dikonversi adalah sebesar 85,30 atau dengan kinerja pelayanan Baik

Hasil perhitungan SKM dalam kuesioner survey terhadap Layanan Wifi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.4

Nilai SKM dan Kinerja 3 Unsur Layanan Wifi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai SKM Per Unsur	Kinerja Pelayanan
1	Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi public (missal: wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-6)	200	4.000	100.00	Sangat Baik
2	Kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi public (misal:wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-7)	123	2.460	61.50	Tidak Baik
3	Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi public (misal:wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-8)	137	2.740	68.50	Kurang Baik
	TOTAL	460	9.200		

Tabel 3.4.5

**Tabel Perhitungan Nilai SKM Layanan Wifi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi public (missal: wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-6)	200	4.000	1.333
2	Kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi public (misal:wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-7)	123	2.460	0.820
3	Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi public (misal:wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-8)	137	2.740	0.913
	Total	460	9.200	3.066
	Total Nilai Konversi (NIK)	3.066		
	Total Nilai Konversi (NIK) x 25	76.66		
	Mutu Pelayanan	B		
	Kinerja Pelayanan	Baik		

Berdasarkan tabel diatas, setelah dilakukan perhitungan dan konversi terhadap nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan wifi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang setelah dikonversi adalah sebesar 76,66 atau dengan kinerja pelayanan **Baik**. Dari rata-rata SKM kedua layanan tersebut, diperoleh nilai IKM Dinas Kominfo sebesar **80,98** dalam artian **Baik** belum mencapai target dengan capaian baru sebesar 94%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	86	80,98	95%

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator ini belum bisa dibuat perbandingannya dikarenakan perhitungannya baru dilaksanakan pada tahun 2022 ini.

Tabel 3.4.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dan target akhir Renstra
Sasaran Srategis 4 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Kominfo

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Infrastruktur Kominfo	80,98	87	93%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Infrastruktur Kominfo sudah mencapai 93%.

Adapun yang menjadi faktor penghambat terhadap capaian indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pergantian penyedia layanan internet pada tahun 2022, sehingga proses migrasi ini berdampak pada pengelolaan akses internet termasuk dengan penyediaan wifi.

Tabel 3.4.7

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional
1.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	80,98	na

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Infrastruktur Kominfod dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak ada penetapan standar skala nasional untuk indikator ini. Namun dengan capaian sebesar 80,98 ini dapat diartikan bahwa IKM kualitas layanan infrastruktur ini terkategori **Baik**

Tabel 3.4.8

Tabel Realisasi Anggaran (per Indikator Kinerja)

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Tahun 2022	
			Realisasi	% serapan dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.745.905.400	2.684.393.998	97,76%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.745.905.400	2.684.393.998	97,76%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	289.423.800	276.720.980	95,61%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	2.456.481.600	2.407.673.018	98,01%

	Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	24.955.000	24.200.600	96,98%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.955.000	24.200.600	96,98%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.955.000	24.200.600	96,98%

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung indikator kinerja terkait dengan nilai IKM kualitas layanan infrastruktur kominfo adalah baik dengan realisasi anggaran diatas 95% yang bersumber dari pelaksanaan 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan pada tahun 2022 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar Rp. 9.395.158.526,- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan selama tahun 2022. Adapun program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2022 secara fisik terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.175.597.733,- atau mencapai 97,66%.

Tabel 3.5

Tabel Realisasi Anggaran

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Tahun 2022	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.884.518.326	1.550.474.750	39,91%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	748.000	169.000	22,59%
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	748.000	169.000	22,59%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.152.220.000	859.958.741	27,28%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.150.972.000	3.087.316.725	97,98%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	750.000	750.000	100,00%
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	249.000	249.000	100,00%
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	249.000	249.000	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.543.226	242.965.351	99,76%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8.147.826	8.139.556	99,90%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	21.112.000	21.080.000	99,85%

	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	8.976.000	8.814.250	98,20%
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	205.307.400	204.931.545	99,82%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.013.600	292.955.658	93,00%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	110.000.000	101.693.130	92,45%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	205.013.600	191.262.528	93,29%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.993.500	154.426.000	89,27%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	94.736.000	79.733.400	84,16%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	4.780.000	2.080.650	43,53%
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	49.972.000	49.930.700	99,92%
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	23.505.500	22.681.250	96,49%
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.705.371.800	2.661.495.151	98,38%

	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.705.371.800	2.661.495.151	98,38%
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	224.957.400	220.803.232	98,15%
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	411.799.600	379.530.146	92,16%
	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	2.064.614.800	2.059.074.898	99,73%
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	4.000.000	2.086.875	52,17%
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.745.905.400	2.684.393.998	97,76%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.745.905.400	2.684.393.998	97,76%
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	289.423.800	276.720.980	95,61%
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	2.456.481.600	2.407.673.018	98,01%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	34.408.000	25.848.250	75,12%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	34.408.000	25.848.250	75,12%
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	26.008.000	21.885.750	84,15%
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah</i>	8.400.000	3.962.500	47,17%

	<i>Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	24.955.000	24.200.600	96,98%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.955.000	24.200.600	96,98%
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>24.955.000</i>	<i>24.200.600</i>	<i>96,98%</i>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang sangat baik dengan capaian rata rata sebesar 100%. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan ini adalah tingginya komitmen pimpinan dan mulai baiknya koordinasi yang terjalin antara berbagai pihak terkait.

Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika sekalligus sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Padang Panjang, Desember 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Padang Panjang**



**Drs. AMPERA, SH.M.Si
NIP. 196810703 198203 1 00**